



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemerintah telah menetapkan asumsi makro ekonomi 2019 dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan keuangan negara dalam APBN. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2019 berada di kisaran 5,4%-6,1%. Target tersebut lebih tinggi dari proyeksi Bank Indonesia yang mematok target pertumbuhan di kisaran 5,1%--5,5%. Bahkan Bank Dunia mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan hanya sekitar 5,3% yang dinilai lebih realistis.

Dalam rancangan RKP 2019 pertumbuhan ekonomi 2019 diharapkan dapat mencapai kisaran 5,4% – 6,1% atau pada titik 5,6%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah fokus pada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan yaitu, industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi serta jasa keuangan.

Pada 2019, pembangunan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian dan pariwisata. Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan. Sementara itu, pemerintah juga menetapkan target inflasi pada 2019 berada di kisaran 2,5%-4,5% untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap sehat. Angka tersebut sejalan dengan target Bank Indonesia yang menetapkan inflasi 2019 di kisaran 3,5% plus minus 1%.

3.1.1. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah

1. Perekonomian Dunia

Hasil riset yang dilakukan *International Monetary Fund* (IMF), menyebutkan bahwa proyeksi ekonomi dunia ke depan akan lebih baik. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2017 ini akan ditutup pada tingkat 3,6% dan akan mengalami pertumbuhan yang baik pada tahun 2018. Senada dengan hal tersebut, Lembaga Keuangan Morgan Stanley juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan mencapai 3,5-3,8%¹.

¹ Bartsch, Elga, Chetan Ahya, Jonathan Ashworth, dan Nora Wassermann. Stronger for Longer. Morgan Stanley Investment Agency. 2017.



Perbaikan kondisi perekonomian dunia pada tahun 2018 sebagian besar banyak disumbang oleh pertumbuhan ekonomi dari Asia yang diperkirakan akan mencapai 5,6% persen. Pertumbuhan ini dinilai naik dari proyeksi untuk tahun sebelumnya. Menurut IMF, hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi Asia adalah adanya tren konsumsi dan investasi. Arus modal masih mengalir deras ke Asia sementara sektor finansial masih dapat terus terkendali. Sementara inflasi secara rata-rata tetap sesuai dengan prediksi akibat masih rendahnya harga komoditas.

Berbagai negara di Asia menurut proyeksi IMF akan mengalami pertumbuhan dari periode sebelumnya. Pada tahun 2017, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% pada akhir periode 2017. Angka ini bila tercapai akan lebih tinggi dari angka pertumbuhan pada tahun 2016 yang berada di angka 5%. Kemudian Tiongkok yang diprediksi akan meraih pertumbuhan 6,8% meningkat dari periode sebelumnya yang berada di angka 6,6%. Sementara negara yang diprediksi akan menjadi Tiongkok berikutnya, India, malah diproyeksi mengalami penurunan ekonomi sebesar 0,5% ke angka 6,7%.

Dalam periode 2017-2019, terdapat optimisme terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Membaiknya kondisi perdagangan internasional dan harga komoditas global akan mendorong kinerja perdagangan internasional dan neraca transaksi berjalan dalam menciptakan insentif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perbaikan kinerja ekspor juga didukung oleh perbaikan daya saing dan kinerja sektor manufaktur yang telah menjadi bagian dari program-program pembangunan. Program-program perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan, pelaksanaan pembangunan sektor maritim akan turut meningkatkan kapasitas produksi nasional serta mendorong perbaikan peluang usaha di berbagai daerah, serta mampu mendorong percepatan integrasi pasar dalam negeri yang mampu membuka peluang usaha yang lebih baik. Besarnya pasar domestik dan integrasi pasar yang lebih baik akan menjadi daya tarik khusus bagi peningkatan investasi, baik swasta nasional maupun asing. Peningkatan aktivitas investasi tersebut juga akan terus didukung dengan upaya perbaikan efisiensi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan teknologi baru dan aktivitas riset dan pengembangan. Dengan langkah-langkah tersebut maka *multiplier effect* investasi bagi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar.

2. Perekonomian Nasional

Perekonomian nasional ke depan diperkirakan relatif stabil dan menunjukkan optimisme dalam jangka menengah.

Kinerja ekonomi makro cenderung membaik yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki tendensi meningkat yang didukung oleh peningkatan investasi, terjaganya konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor, dan inflasi yang relatif rendah.

Dari sisi perekonomian global, walaupun perekonomian AS menunjukkan perbaikan, perekonomian dunia masih dibayangi risiko ketidakpastian. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi global antara lain kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Risiko lain bersumber dari normalisasi moneter di beberapa negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global serta situasi geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia.

Perkembangan perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Tren perkembangan yang positif perekonomian domestik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) adanya supply constraints karena daya dukung infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai memerlukan terobosan-terobosan untuk mendorong produktivitas; (ii) masih kurang kuatnya daya saing ekonomi membutuhkan efisiensi sistem logistik dan birokrasi; (iii) permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu diatasi melalui kebijakan afirmasi dalam mewujudkan ketahanan energi dan ketahanan pangan serta penciptaan lapangan kerja; dan (iv) isu-isu terkait dinamika ketenagakerjaan dan skill gap antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan vokasional.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh pada kisaran 5,5 hingga 6,5 persen secara bertahap meningkat per tahun, yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Upaya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional ke depan membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan investasi serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Upaya peningkatan kinerja investasi sebagai salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum dan kebijakan.

3. Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 semakin membaik sejalan dengan kondisi perekonomian nasional dan dunia.



Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dunia dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan RPJMD pada tahun 2020 sebesar 4+1%, dan inflasi dijaga pada kisaran angka 3,50±1. Target indikator makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi			Proyeksi	
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	2,01	4-4,4	4+1	5+1
2	Laju Inflasi	%	3,53	4,02	3,47	3,50±1	3,50±1
3	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,359	0,339	0,35±0,01	0,35±0,01
4	Persentase penduduk miskin	%	5,84	6,13	5,83	5,53	5,52

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bintan

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2019 disusun berdasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2019 dan tantangan dan prospek ekonomi daerah, serta memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau maka kebijakan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2019 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi agar lebih dapat membawa kemakmuran bagi seluruh penduduk, dengan fokus pada:

1. Mendorong tumbuhnya pembentukan modal tetap bruto/investasi, dengan memberikan kemudahan perijinan, pemangkasan waktu dan biaya investasi serta perbaikan infra struktur di Kabupaten Bintan.
2. Mendorong sektor-sektor ekonomi yang ada untuk meningkatkan produksi dengan memberikan kemudahan kredit modal berbunga rendah dan optimalisasi penyuluhan/bimbingan, serta menggalakkan pemakaian produksi lokal sehingga defisit perdagangan bisa berkurang.
3. Konsumsi pemerintah dalam hal ini APBD yang diserap terutama belanja publik diarahkan untuk kegiatan/proyek yang menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi seperti sektor keuangan, sektor perdagangan, dan sektor industri. Khususnya di sektor jasa-jasa, Kabupaten Bintan memiliki potensi sumber daya yang besar untuk kegiatan yang bersifat pelayanan.

4. Mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan melalui sidak atau kebijakan lainnya, menjaga ekspektasi di tingkat masyarakat agar tidak ada isu tentang proses kenaikan komoditas, dan mengontrol jumlah dan tata niaga maupun distribusi komoditas, terutama komoditas yang memiliki elastisitas tinggi di tingkat masyarakat atau biasa disebut dengan 9 bahan pokok.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa analisis keuangan daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RKPD pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya. Kebijakan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan, antara lain sebagai berikut :

1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) secara periodik bersama-sama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau);
2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data wajib pajak khususnya terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat

3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain : Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Tanjungpinang.

Pemerintah daerah pada tahun 2019 mengambil Kebijakan dan langkah- langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah pada tingkat yang maksimal guna membiayai belanja daerah, kebijakan dimaksud disesuaikan dengan asumsi - asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dalam kerangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintan

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat, dihitung dengan memperhatikan realisasi pajak daerah dari tahun 2010 s/d September 2016, memperhatikan regulasi dan potensi sumber pajak dan retribusi daerah.
2. Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami menurun pada tahun 2016 dan 2017 disesuaikan dengan angka dana bagi hasil pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Perpres 66/2016 tentang rincian APBN 2016. Diharapkan pada tahun 2018-2021 mengalami peningkatan pendapatan dana bagi hasil pajak. Khusus untuk DAU dan DAK disesuaikan dengan kebijakan pemerintah akan adanya penundaan DAU Provinsi Kepulauan Riau.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (BOS dan DID) diproyeksikan meningkat dengan persentase kenaikan berdasarkan perkiraan yang paling riil karena perkembangan tahun 2010-2015 sangat fluktuatif.

Berikut ini disajikan realisasi pendapatan daerah Tahun 2017 dan 2018, serta proyeksi realisasi pendapatan Tahun 2019.



Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bintan

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
		2018	2018	(%)	2017
4	PENDAPATAN	1.011.344.578.689,97	1.128.432.282.210,94	111,58	257.458.323.327,71
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	240.554.279.251,96	286.602.276.549,94	119,14	257.016.888.031,87
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	193.966.820.000,00	209.689.787.533,74	108,11	181.122.766.938,88
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.624.000.000,00	10.386.023.897,00	120,43	8.905.716.565,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	13.994.946.188,00	13.994.946.188,00	100	14.636.447.387,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	23.968.513.063,96	52.531.518.931,20	219,17	52.351.957.140,99
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	653.872.576.000,00	740.417.202.564,00	113,24	0
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	653.872.576.000,00	740.417.202.564,00	113,24	0
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak - LRA	31.721.776.000,00	24.060.800.451,00	75,85	0
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	14.386.218.000,00	116.197.572.997,00	807,7	0
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	484.586.669.000,00	484.586.669.000,00	100	0
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	123.177.913.000,00	115.572.160.116,00	93,83	0
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	116.917.723.438,01	101.412.803.097,00	86,74	441.435.295,84
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	21.763.809.438,01	0	0	0
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	46.500.000.000,00	52.758.889.097,00	113,46	0
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LRA	48.653.914.000,00	48.653.914.000,00	100	0
4 . 3 . 9	Pendapatan Lainnya	0	0	0	441.435.295,84



Tabel 3.3. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2019 dan 2020

No	Uraian	2019*	2020*
-1	-2	-6	-7
A	PENDAPATAN	1.207.710.729.085,00	1.170.134.375.355,00
1	Pendapatan Asli Daerah	242.002.180.085,00	257.479.013.405,00
a	Pendapatan Pajak Daerah	192.451.200.000,00	205.922.784.000,00
b	Pendapatan Retribusi Daerah	11.723.400.000,00	12.544.038.000,00
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.135.353.685,00	14.135.353.685,00
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.692.226.400,00	24.876.837.720,00
2	Pendapatan Transfer	815.750.402.000,00	762.697.214.950,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	149.958.147.000,00	149.958.147.000,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bintan perubahan tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Belanja Langsung diupayakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan prioritas pembangunan daerah melalui RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2019;
- 2) Pendanaan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan.
- 3) Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- 4) Penyediaan anggaran anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain : peningkatan kualitas SDM dibidang perekonomian potensial di Kabupaten Bintan.
- 5) Pembangunan yang mendukung pencapaian IPM dengan memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui penyusunan skala prioritas anggaran baik pada belanja di SKPD maupun di luar SKPD. Penyusunan skala prioritas tersebut diarahkan mendukung pencapaian sasaran pembangunan terutama pencapaian sasaran pembangunan dalam kebijakan strategi pembangunan daerah yang mencakup dimensi pembangunan serta kondisi perlu dalam pelaksanaan strategi tersebut. Namun demikian, prinsip efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan belanja prioritas maupun belanja aparatur terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna dan dapat memberikan katalisator bagi pelaku pembangunan.

Berdasarkan kerangka tersebut di atas, maka arah kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Bintan di 2019 ditujukan untuk peningkatan kualitas belanja daerah yang terfokus pada alokasi belanja prioritas dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui:

1. Pengalihan belanja kurang produktif ke program-program yang lebih produktif;
2. Perbaikan kualitas perencanaan belanja;
3. Perbaikan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran.

Dalam implementasinya, upaya monitoring dan evaluasi terus diperkuat sehingga hasil monitoring dan evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran dapat disinkronkan. Monitoring dan evaluasi bukan saja tentang penyerapan anggaran, namun juga pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Di samping rencana kerja yang konkret, alokasi belanja prioritas juga sangat tergantung dari mekanisme pelaksanaannya. Sebuah rencana yang baik beserta dukungan penganggaran yang cukup, menjadi tidak efektif bila mekanisme pelaksanaannya tidak tepat. Termasuk dalam hal ini adalah penyempurnaan proses administrasi dan pencairan anggaran agar lebih tepat dan cepat, namun tetap terjaga akuntabilitasnya, efektivitas dan efisiensi belanja di setiap SKPD tetap dilanjutkan melalui reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan di tahun sebelumnya. Penerapan prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure) serta anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) akan terus diperkuat. Dalam kerangka penerapan kedua prinsip tersebut juga akan diperkuat mekanisme penelaahan program dan kegiatan seperti yang telah berjalan saat ini. Penelaahan program dan kegiatan ini diarahkan



untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kapasitas implementasi belanja yang lebih baik.

Seiring dengan perkuatan untuk meningkatkan kualitas belanja di kabupaten, perkuatan juga dilakukan dengan pemerintah desa melalui intensifikasi berbagi pengalaman (sharing experience) dengan pemerintah desa. Diharapkan melalui hal tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran.

Berikut realisasi anggaran tahun 2018;

Tabel 3.4. Realisasi Belanja 2017 - 2018 Kabupaten Bintan

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2018	REALISASI	
		2018			
				(%)	2017
5		1.097.458.455.694,61	1.001.081.722.074,99	91,22	918.808.463.159,87
5 . 1	BELANJA OPERASI	874.563.690.424,33	794.745.030.843,26	90,87	717.884.682.638,25
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	528.687.571.800,75	477.379.727.949,00	90,30	440.442.091.862,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	323.267.218.623,58	299.485.547.989,26	92,64	277.442.590.776,25
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	11.205.400.000,00	10.676.770.000,00	95,28	0,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	11.403.500.000,00	7.202.984.905,00	63,16	0,00
5 . 2	BELANJA MODAL	221.894.765.270,28	206.336.691.231,73	92,99	200.923.780.521,62
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	9.278.342.400,00	7.682.136.015,00	82,80	10.876.057.426,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.648.246.348,53	39.477.037.669,47	94,79	27.915.117.554,56
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.728.526.539,72	61.895.946.173,00	97,12	73.298.556.223,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.899.645.400,00	94.328.156.098,00	90,79	86.052.658.604,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.466.173.982,03	2.262.911.776,26	91,76	2.770.005.714,06
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	873.830.600,00	690.503.500,00	79,02	11.385.000,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Berikut ini Proyeksi belanja berdasarkan dokumen perubahan RPJMD

Tabel 3.5. Proyeksi Belanja Kabupaten Bintan

NO	Uraian	2019	2020
B	BELANJA DAERAH	1.256.010.736.834,00	1.205.070.615.582,20
1	Belanja Tidak Langsung		
	Belanja Pegawai	477.583.082.644,00	477.583.082.644,00
	Belanja Bunga	-	
	Belanja Subsidi		
	Belanja Hibah	12.834.000.000,00	11.550.600.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	10.005.404.000,00	9.805.295.920,00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa		
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	108.304.468.434,00	110.470.557.802,68
	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung		
2	Belanja Langsung		
	Belanja Pegawai	99.971.336.200,00	91.973.629.304,00
	Belanja Barang dan Jasa	294.386.980.865,16	270.836.022.395,95



NO	Uraian	2019	2020
	Belanja Modal	250.925.464.690,84	230.851.427.515,57
	Jumlah Belanja Langsung	645.283.781.756,00	593.661.079.215,52
	Jumlah Belanja Daerah	1.256.010.736.834,00	1.205.070.615.582,20
	Surplus/Defisit	-48.300.007.749,00	-34.936.240.227,20

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

Realisasi dan pembiayaan tahun 2018 adalah sebagai berikut;

Tabel 3.6. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bintan Tahun 2018

No	URAIAN		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN 2018	(%)	REALISASI
			2018			2017
7 . 1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	176.143.704.338,64	176.148.704.338,64	100,00	2.000.000,00
7 . 1 . 1		Penggunaan SiLPA	176.143.704.338,64	176.143.704.338,64	100,00	0,00
7 . 1 . 6		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00		0,00	2.000.000,00
7 . 2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
7 . 2 . 2		Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
		PEMBIAYAAN NETTO	174.143.704.338,64	174.148.704.338,64	100,00	2.000.000,00
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	213.942.902.739,59	0,00	(661.348.139.832,16)

Proyeksi pembiayaan Kabupaten Bintan selama tiga tahun terakhir dan dua tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Bintan

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
C	PEMBIAYAAN				
1	Penerimaan				
	SILPA	176.143.704.338,64	50.300.007.749,00	36.936.240.227,20	36.268.599.622,26
	Hasil kekayaan				
	Pengembalian pokok BLUD		-		
	Jumlah penerimaan	176.143.704.338,64	50.300.007.749,00	36.936.240.227,20	36.268.599.622,26
2	Pengeluaran				
	Penyertaan modal	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Pemberian pinjaman		-		